

ABSTRAK

KOORDINASI KERJA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN BUPATI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 (Study Kasus Daerah Tapanuli Selatan)

**O L E H
SYAHRUL M. PASARIBU
NPM : 10 840 0236
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Penataan lingkungan hidup sebagai suatu kajian administrasi negara meletakkan fungsi-fungsi pemerintah untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup khususnya dalam hal pelaksanaan pengawasan, sehingga kedudukan yang demikian memberikan akibat bagi pemerintahan bahwa kepentingan rakyat banyak akan lingkungan hidup yang bersih, teratur merupakan suatu keinginan fungsi-fungsi hukum administrasi negara. Salah satu peranan pemerintah daerah dalam kajian ini adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah yaitu Bupati untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Intensitas keberadaan Bupati melalui peranan menetapkan kebijakan sangat memiliki signifikansi dalam hal pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pemerintahannya. Karena tugas seorang Bupati sebagai Kepala Daerah adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, yang salah satu sarannya adalah melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi kerja antara Bupati dan DPRD dalam penataan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan dan bagaimana permasalahan koordinasi kerja antara Bupati dan DPRD dalam penataan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan koordinasi kerja antara bupati dan DPRD dalam penataan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan pada dasarnya adalah koordinasi dalam lintas sektoral seperti mengadakan rapat kerja dan rapat konsultasi untuk mencari penyelesaian permasalahan dalam penataan lingkungan hidup. Koordinasi kerja tersebut tidak terlepas dari fungsi dan kedudukan Bupati maupun DPRD. Permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi kerja antara bupati dan DPRD dalam penataan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sulitnya menentukan waktu pelaksanaan koordinasi, fungsi pengawasan DPRD yang belum maksimal, serta lemahnya sumber daya manusia baik dikalangan SKPD maupun anggota DPRD yang ditempatkan di komisi yang mengurus masalah lingkungan hidup.